

Pengaruh Insentif Eksekutif, *Corporate Risk*, *Corporate Governance* dan

Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax avoidance*

(Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang *listing* di BEI Tahun 2012-2017)

SKRIPSI



Ditulis oleh:

Nama : Aristianto Dwi Saputra

Nomor Mahasiswa : 14312032

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2018

Pengaruh Insentif Eksekutif, *Corporate Risk*, *Corporate Governance* dan

Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax avoidance*

(Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang *listing* di BEI Tahun 2012-2017)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana

Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama : Aristianto Dwi Saputra

Nomor Mahasiswa : 14312032

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman / sanksi dalam bentuk apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 30 April 2018

Penulis,



(Aristianto Dwi Saputra)

PENGESAHAN SKRIPSI

**Pengaruh Insentif Eksekutif, *Corporate Risk*, *Corporate Governance* dan
Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax avoidance***

(Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang listing di BEI Tahun 2012-2017)

SKRIPSI

Oleh:

Nama : Aristianto Dwi Saputra

Nomor Mahasiswa : 14312032

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal.....³⁰/₁₈.....⁴.....

Dosen Pembimbing,



(Umi Sulistiyanti, S.E., Ak., M.Acc.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH INSENTIF EKSEKUTIF, CORPORATE RISK, CORPORATE GOVERNANCE
DAN KONSERVATISME AKUNTANSI TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI EMPIRIS
PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG LISTING DI BEI TAHUN 2012-2017)**

Disusun Oleh : **ARISTIANTO DWI SAPUTRA**

Nomor Mahasiswa : **14312032**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

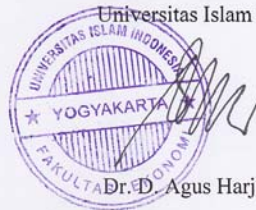
Pada hari Kamis, tanggal: 7 Juni 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Umi Sulistiyanti, SE., Ak., M.Acc.

Penguji : Ataina Hidayati, Dra., Ak., M.Si.,Ph.D.



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh insentif eksekutif, *corporate risk*, *corporate governance* dan konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance*. Populasi penelitian ini adalah perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017 yaitu sebanyak 41 perusahaan. Sampel penelitian berjumlah 5 perusahaan atau 30 data observasi yang dipilih dengan metode purposive sampling. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dan analisis data menggunakan analisis Regresi Linier. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kualitas audit dan konservatisme akuntansi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Insentif eksekutif, *corporate risk*, Kepemilikan Institusional, komisaris independen dan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci: Insentif Eksekutif, *Corporate Risk*, kepemilikan institusional komisaris independen, komite audit, kualitas audit, konservatisme akuntansi, *tax avoidance*.

ABSTRACT

This research aims to empirically examine the influences of executive incentive, corporate risk, Corporate Governance and accounting conservatism on tax avoidance. The research's population of this study are Mining companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 and 2017 which is 41 companies. This research samples were 5 companies or 30 observation data selected by purposive sampling method. The data used secondary data that obtained from Indonesia Stock Exchange (IDX) and it was analyzed by multiple regression. The result of the research shows that audit quality, and conservatism accounting have negative significant effect on tax avoidance. While executive incentive, corporate risk, institutional ownership, independent commissioners and audit committee, does not influence tax avoidance.

Key Words: executive incentive, corporate risk, Institutional ownership, Independent commissioners, Audit committee, Audit quality, accounting conservatism, Tax avoidance.

MOTTO

“Success does not belong to those who are smart and intelligent, success belongs to those who have dreams and struggle to reach that dream”

“Kesuksesan bukanlah milik orang yang pintar dan cerdas, kesuksesan adalah milik mereka yang memiliki mimpi dan berjuang mati matian untuk mewujudkan mimpi itu”

“The biggest weakness lies in despair. The surest way to succeed is always to try it one more time”

“Kelemahan terbesar seseorang terletak pada keputusasaan, Cara yang paling baik untuk sukses adalah dengan selalu mencoba dan terus mencoba”

PERSEMBAHAN

Karya Tulis ini ku persembahkan untuk:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala

Kedua Orang Tua beserta seluruh Keluarga Besar

Sahabat dan Teman Seperjuangan

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Tak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi Wasallam, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Pengaruh Insentif Eksekutif, *Corporate Risk*, *Corporate Governance* dan Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang *listing* di BEI Tahun 2012-2017)”**

Proses penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah memberikan rahmat, kesehatan, kesempatan, kemudahan, dan kelancaran bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.
2. Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi Wasallam, sebagai suri tauladan bagi seluruh umatnya. Semoga keteladanan beliau dalam segala hal akan terus menjadi pedoman bagi penulis dalam menjalani hidup ini.
3. Rusmanto dan Rumiwati sebagai orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih atas segala yang telah diberikan kepada penulis. Semoga ilmu yang didapat oleh

penulis dapat mengantarkan penulis meraih kesuksesan dan dapat membahagiakan (bapak dan ibu).

4. Andi Rahmianto Saputro, Trio Mandala Sputro dan Chrisnanto Aji Saputro sebagai kakak dan adik dari penulis. Penulis bersyukur karena memiliki kakak dan adik yang selalu memberi motivasi sehingga meningkatkan semangat penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
5. Bu Umi Sulistiyanti, S.E., Ak., M.Acc. selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan saran sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga Bu Umi sekeluarga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wata'ala dan dilancarkan rezekinya.
6. Bapak Nandang Sutrisno, SH., LLM., M.Hum., PhD. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh pimpinan universitas.
7. Bapak Dr. Dwipraptono Agus Harjito, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Drs. Dekar Urumsah, S.Si, M.Com., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Akuntansi FE UII beserta segenap jajaran pengajar Prodi Akuntansi.

9. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi, yang telah memberikan banyak ilmu dan pelajaran bagi penulis selama proses perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
10. Ingried Aulia Kumangki sebagai partner yang selalu ada, selalu sabar dan ikhlas dalam menemani penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga sukses segala sesuatu yang ingin dicapai dan semoga mimpi kita segera bisa terwujud.
11. Khalifa Family (Arif, Ihan, Fahmi, Rafli, dan Evel) terima kasih untuk waktunya dan semua pembelajaran hidup selama kita bersama, terima kasih atas saran dan nasihat nya. Semoga kita bisa sukses dan bisa berkumpul lagi.
12. Teman-teman KKN unit 15 (Addi, Akmal, Yudha, Vivi, Eva, Tiwi, Avi dan Wihdah) dan warga Kelurahan Luweng Lor, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih pengalaman dan kebersamaan yang telah kalian berikan selama satu bulan.
13. Karang Taruna CEMPAKA terima kasih untuk waktunya dan semua pembelajaran hidup selama ini. Terima kasih atas motivasi dan segala canda tawanya selama penulis bersama dengan kalian, semoga kita semua sukses dan bisa menjadi kebanggaan dusun Ceper.

Kepada seluruh pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas doa dan suntikan semangatnya.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah-Nya bagi Bapak, Ibu, Saudara dan teman-teman yang telah membantu penulis dalam segala hal. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran diperlukan untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap karya ini dapat bermanfaat.

Wassalamualaikum wr.wb

Penulis,

(Aristianto Dwi Saputra)

DAFTAR ISI

#	
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSIiii
ABSTRAKSIvi
MOTTOvii
KATA PENGANTARviii
DAFTAR ISIxii
DAFTAR TABELxvi
DAFTAR GAMBARxvii
DAFTAR LAMPIRANxviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Teori Agensi (<i>agency theory</i>)	11
2.1.2 Penghindaran Pajak (<i>tax avoidance</i>).....	12
2.1.3 Insentif Eksekutif.....	14

2.1.4	Risiko Perusahaan (<i>Corporate Risk</i>).....	14
2.1.5	<i>Corporate Governance</i>	15
2.1.6	Kepemilikan Institusional	17
2.1.7	Komisaris Independen.....	18
2.1.8	Komite Audit	19
2.1.9	Kualitas Audit	19
2.1.10	Konservatisme Akuntansi	20
2.2	Penelitian Terdahulu	21
2.3	Pengembangan Hipotesis	24
2.3.1	Pengaruh Insentif Eksekutif Terhadap <i>Tax avoidance</i>	24
2.3.2	Pengaruh <i>corporate risk</i> terhadap <i>tax avoidance</i>	24
2.3.3	Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap <i>tax avoidance</i>	26
2.3.4	Pengaruh Komisaris Independen terhadap <i>tax avoidance</i>	27
2.3.5	Pengaruh komite audit terhadap <i>tax avoidance</i>	28
2.3.6	Pengaruh kualitas audit terhadap <i>tax avoidance</i>	29
2.3.7	Pengaruh Konservatisme akuntansi terhadap <i>tax avoidance</i>	29
2.4	Kerangka Pemikiran.....	31
BAB III METODE PENELITIAN		32
3.1	Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian	32
3.2	Teknik Pengambilan Sampel	32
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.4	Variabel dan Definisi Operasional Variabel	33
3.4.1	<i>Tax avoidance</i>	34
3.4.2	Insentif eksekutif.....	35
3.4.3	Corporate Risk	35
3.4.4	Kepemilikan Institusional	36
3.4.5	Komisaris Independen	37
3.4.6	Komite Audit	37

3.4.7	Kualitas Audit	38
3.4.8	Konservtisme Akuntansi	38
3.5	Teknik Analisis Data	39
3.5.1.	Statistik Deskriptif	39
3.5.2.	Uji Asumsi Klasik	39
3.6	Pengujian Hipotesis	41
3.6.1	Analisis Regresi Berganda	41
3.6.3	Uji F / Uji Kelayakan Model (<i>Goodness of Fit</i>)	43
3.6.4	Uji Hipotesis (Uji t)	43
BAB IV ANALISIS DATA & PEMBAHASAN		45
4.1	Hasil Pengumpulan Data	45
4.2	Analisis Statistik Deskriptif	46
4.3	Uji Asumsi Klasik	48
4.3.1	Uji Normalitas	48
4.3.2	Uji Multikolinieritas	49
4.3.3	Uji Autokorelasi	50
4.3.4	Uji Heteroskedasitas	51
4.4	Analisis Regresi Berganda	52
4.4.1	Koefisien Determinasi (adjust. R^2)	53
4.4.2	Uji Regresi Simultan F	54
4.4.3	Uji Regresi Parsial (Uji T)	55
4.5	Pembahasan	57
4.5.1	Pengaruh Insentif Eksekutif terhadap <i>tax avoidance</i>	57
4.5.2	Pengaruh Corporate Risk terhadap <i>tax avoidance</i>	58
4.5.3	Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap <i>tax avoidance</i>	59
4.5.4	Pengaruh Komisaris Independen terhadap <i>tax avoidance</i>	59
4.5.5	Pengaruh Komite Audit terhadap <i>tax avoidance</i>	60
4.5.6	Pengaruh Kualitas Audit terhadap <i>tax avoidance</i>	61

4.5.7	Pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap <i>tax avoidance</i>	62
BAB V PENUTUP		64
5.1	Kesimpulan	64
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	64
5.3	Saran	65
5.4	Implikasi Penelitian.....	65
DAFTAR PUSTAKA		67
LAMPIRAN		69

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tabel Kepatuhan Pajak	13
Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	21
Tabel 4. 1 Kriteria Sampel Pada Penelitian	45
Tabel 4. 2 Tabel Statistik Deskriptif.....	46
Tabel 4. 3 Uji Multikolinieritas.....	49
Tabel 4. 4 Uji Autokorelasi	50
Tabel 4. 5 Uji Regresi Linier Berganda	53
Tabel 4. 6 Koefisien Determinasi.....	53
Tabel 4. 7 Uji F.....	54
Tabel 4. 8 Uji T.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	31
Gambar 4. 1 Grafik Normal P-Plot.....	48
Gambar 4. 2 Hasil Uji Heteroskedasitas	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Sampel Perusahaan.....	70
Lampiran 2: Input data Variabel Dependen	71
Lampiran 3: Input data Variabel Independen.....	72
Lampiran 4 : Hasil Output SPSS.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi nyata dari masyarakat yang dapat dilakukan untuk membantu meningkatkan pendapatan suatu Negara. Dengan kata lain Pajak memiliki peranan yang sangat penting dan vital bagi suatu Negara. Penerimaan sektor pajak di Indonesia adalah sumber penerimaan yang paling potensial, hampir 70% total pendapatan Negara Indonesia di peroleh dari sektor pajak setiap tahun. Tingginya penerimaan sektor pajak membuat pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan demi mengoptimalkan penerimaan pajak antara lain dengan membuat aturan – aturan baru mengenai perpajakan ataupun merevisi undang – undang perpajakan. Namun pada kenyataanya ada banyak kendala yang dihadapi pemerintah dalam optimalisasi penerimaan pajak salah satunya adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Tax avoidance adalah upaya penghindaran pajak dengan memenuhi ketentuan perpajakan dan menggunakan strategi di bidang perpajakan. Penghindaran pajak ini dilakukan karena banyak wajib pajak badan maupun pribadi merasa terbebani untuk membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut wajib pajak berusaha untuk meringankan kewajiban pemabayaran pajak dengan cara meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar (Dewi dan Sari 2015). Banyak

contoh kasus penghindaran pajak yang melibatakan perusahaan. Salah satu sektor perusahaan yang melakukan penghindaran pajak adalah sektor pertambangan. Dengan sumber daya alam yang begitu kaya, sektor pertambangan merupakan sektor yang paling rentan untuk melakukan praktik penghindaran pajak karena memiliki profit yang cukup besar dari aktivitas pertambangan yang dilakukan. Oleh karena itu menarik untuk dilakukan penelitian.

Data dari Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan mencatat kepatuhan pelaporan SPT tahunan yang dilakukan di sektor pertambangan terutama pada mineral dan batu bara perbandingan yang lapor dan tidak lapor sebagai berikut dikutip dari metronews.com

Tabel 1. 1 Tabel Kepatuhan Pajak

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
Yang Melapor	3955	4055	3943	3795	3580
Yang tidak melapor	4148	4048	4160	4308	4523

Sumber: metrotvnews.com 2015

Dari tabel kepatuhan pajak diatas ternyata berimplikasi terhadap kasus penghindaran pajak. Salah satu kasus penghindaran pajak yang pernah dilakukan oleh perusahaan tambang adalah perusahaan PT Kaltim Prima Coal. PT. Kaltim Prima Coal Melakukan praktik yaitu transfer pricing dengan menjual batubara dengan harga miring, dibawah harga yang berlaku di pasaran ke perusahaan

terafiliasi (PT Indocoal Resource Limited). Penjualan batubara hanya dihargai separuh dari harga yang biasa dilakukan KPC menjual langsung kepada pembeli. Berikutnya, penjualan ke pembeli lainnya pun dilakukan oleh Indocoal dengan memakai harga jual KPC biasanya. Akibatnya, omset penjualan batubara yang dilakukan KPC jauh lebih rendah sehingga negara dirugikan sebesar Rp 1,7 triliun. (www.pajak.go.id.)

Penghindaran pajak memang sudah biasa dilakukan oleh banyak perusahaan. Banyak cara yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak diantaranya pembelian bahan baku yang dilakukan oleh induk perusahaan ke anak perusahaan dalam satu group, pembayaran atas HAKI, dan berutang atau menjual obligasi.

Insentif Ekskutif berkaitan erat dengan hubungan antara principal dan agen. Insentif diberikan semata-mata untuk meningkatkan motivasi eksekutif di perusahaan agar dapat bekerja dengan baik, dan diharapkan dapat mencapai tujuan perusahaan. Eksekutif memiliki peranan yang penting dalam menentukan arah dan kebijakan sebuah perusahaan. Budiman dan Setioyono (2012) menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tentu saja juga melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri. Pemimpin perusahaan biasanya memiliki dua karakter yaitu *risk taker* dan *risk averse*. Pemimpin perusahaan yang memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan yang ada. Jika dikaitkan dengan penghindaran pajak,

insentif pajak akan meningkatkan kinerja eksekutif sehingga eksekutif akan termotivasi untuk bekerja sesuai dengan tujuan perusahaan dan menghindari perilaku yang menyimpang salah satunya adalah menghindari tindakan penghindaran pajak. Risiko perusahaan adalah suatu kondisi dimana kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan kinerja suatu perusahaan menjadi lebih rendah dari yang diharapkan diakibatkan karena ketidak pastian dimasa yang akan datang (Dewi dan Sari 2015). Dalam penelitian (Paglivora 2010) menjelaskan risiko perusahaan merupakan volatilitas *earning* perusahaan, yang dapat diukur dengan rumus deviasi standar. Dengan demikian dapat diartikan bahwa risiko perusahaan merupakan sebuah penyimpangan atau deviasi satandar dari *earning* baik penyimpangan yang bersifat kurang dari yang direncanakan (*down risk*) atau lebih dari yang direncanakan (*upsite potential*). Semakin besar deviasi *earning* dalam perusahaan semakin besar pula risiko perusahaan. Risiko perusahaan yang tinggi tentu akan berdampak pada pengindaran pajak. Semakin tinggi risiko perusahaan maka semakin rendah tingkat pembayaran pajaknya.

Dari banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan maka penting bagi perusahaan memiliki tata kelola yang baik. *Corporate governance* adalah sebuah alat yang digunakan untuk menegakan prinsip pengendalian dan saling mengawasi antara pemilik perusahaan dan agen. Penerapan *Corporate governance* bertujuan untuk meminimumkan konflik keagenan. Konflik keagenan muncul apabila tujuan yang ingin dicapai oleh manajer perusahaan tidak sejalan

dengan kepentingan pemegang saham. Pemegang saham mengharapkan pendapatan (dividen) yang maksimal atas dana yang mereka investasikan. Pihak manajemen lebih mementingkan aktivitas operasional perusahaan dengan tidak membagikan dividen dan mengalokasikannya sebagai laba ditahan. Keselarasan hubungan pemegang saham dan manajer perusahaan akan mempengaruhi kebijakan perpajakan yang akan digunakan (Darmawan dan Sukartha 2014). Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mekanisme GCG meliputi kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris, komite audit dan kualitas audit.

Kepemilikan Institusioal adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi. Keberadaan kepemilikan investor-investor institusional akan mampu mengawasi kinerja insider (Jensen dan Meckling 1976). Struktur kepemilikan saham pada perusahaan publik dapat digolongkan menjadi 3 yaitu kepemilikan perorangan, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial yang didalamnya termasuk eksekutif perusahaan. Pohan et al. (2009) Jika dikaitkan dengan penghindaran pajak maka kepemilikan institusional yang tinggi pada suatu perusahaan akan membuat intensitas pengawasan juga semakin tinggi. Pengawasan yang tinggi tentu akan mencegah penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen.

Kemudian selanjutnya adalah komisaris independen, dewan komisaris merupakan salah satu karakteristik dewan yang berhubungan dengan kandungan

informasi laba dalam sebuah perusahaan. Komposisi dewan komisaris dapat mempengaruhi manajemen dalam menyusun laporan keuangan dengan demikian penghindaran pajak dapat lebih diminimalisir.

Faktor yang lain adalah komite audit, komite audit memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai penghubung para pemegang saham. Tugas komite audit sangat penting yaitu melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh perusahaan dalam hal pelaporan keuangan. Jika komite audit yang ditugaskan tidak sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh BEI yang mengharuskan minimal 3, maka berakibat pada meningkatnya tindakan manajemen dalam meminimalisasi laba (Swingly dan Sukartha 2015). Sehingga pembayaran pajak menjadi minimal.

Selanjutnya yaitu kualitas audit, audit merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengurangi ketidak selarasan informasi yang terdapat antara manajemen dan pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan. Di dunia audit, nama KAP *big four* sudah tidak asing lagi. KAP *big four* memiliki reputasi yang cukup baik. Jika dikaitkan dengan penghindaran pajak maka tentunya perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four* akan berusaha bersifat transparan dan akan sulit untuk melakukan manipulasi dalam laporan keuangan yang berkaitan dengan pajak.

Menurut FASB *Stament of Concept* No.2 konservatisme adalah reaksi hati-hati untuk menghadapi ketidakpastian dan risiko terhadap situasi bisnis telah

dipertimbangkan di masa yang akan datang. Reaksi hati-hati ini berdampak terhadap komitmen manajemen untuk memberi informasi terkait laporan keuangan yang transparan akurat dan tidak menyesatkan adalah faktor yang menentukan tingkat konservatisme akuntansi dalam pelaporan keuangan perusahaan. Hal ini dapat mempengaruhi pada laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan (Pramudito dan Sari 2015). Jika dikaitkan dengan penghindaran pajak maka praktik konservatisme akuntansi akan berdampak pada proses pelaporan keuangan yang didalamnya terdapat berbagai macam kebijakan salah satunya adalah kebijakan terkait pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **Pengaruh Insentif Eksekutif, *Corporate Risk*, dan *Corporate Governance* pada *Tax avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang *listing* di BEI Tahun 2012-2017)**. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Dewi dan Sari (2015). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah ada tambahan variabel baru yaitu konservatisme akuntansi dan objek yang digunakan pada penelitian adalah perusahaan tambang yang listing di BEI sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan objek perusahaan manufaktur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah insentif eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *corporate risk* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
6. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
7. Apakah Konservatisme Akuntansi berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti bertujuan untuk menganalisis:

1. Pengaruh insentif eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan tambang.
2. Pengaruh *corporate risk* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan tambang.
3. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan tambang.
4. Pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan tambang.
5. Pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan tambang.
6. Pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan tambang.
7. Pengaruh konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance* pada perusahaan tambang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari hasil analisis pengaruh Insentif Eksekutif, *Corporate Risk*, dan *Corporate Governance* pada *Tax avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang *listing* di BEI Tahun 2012-2017) yaitu:

1. Bagi Pemerintah Direktorat Jendral Pajak, dapat menambah informasi dalam pembuatan kebijakan yang tepat dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak wajib badan pada perusahaan sektor pertambangan.
2. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi serta pemahaman dan wawasan mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance*.
3. Bagi Perusahaan, penelitian ini dapat menjadikan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakn perusahaan agar tetap patuh dan taat terhadap hukum dan tidak melakukan penyimpangan yaitu penghindaran pajak.
4. Bagi Peneliti, dapat menambah pengetahuan dan mengimplementasikan ilmu khususnya dalam insentif eksekutif, *corporate risk*, *corporate governance* dan konservatisme akuntansi dengan baik sehingga dapat mengurangi praktik penghindaran pajak di perusahaan.

1.5 Sistematika Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, skripsi ditulis dan disajikan kedalam lima bab. Yang mana tiap-tiap babnya akan disusun secara sistematis sehingga menggambarkan hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Didalam bab I ini, menerangkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menerangkan tentang dasar-dasar teori yang didapat dari literatur-literatur serta bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis. Dalam bab ini diterangkan pula kerangka pemikiran dan hipotesis yang akan diuji.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional dan metode penelitian yang akan digunakan.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas secara deskriptif variabel-variabel yang berkaitan dengan masalah penelitian, analisis dan data yang digunakan, serta pembahasan mengenai masalah yang diteliti.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan akhir yang diperoleh dari hasil analisis pada bab sebelumnya dan saran-saran yang diberikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan atas hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*agency theory*)

Teori agensi memberikan fokus terhadap fakta yang berkembang bahwa dalam setiap organisasi individu disebut dengan *the agent* akan bertindak sebagai pihak yang dipercaya oleh individu atau kelompok individu lain yang disebut dengan *principal*. Hubungan antara keduanya akan terjadi didalam sebuah organisasi atau perusahaan yang biasa digambarkan dengan hubungan antara pemegang saham (*stockholders*) sebagai *principal* dan *manager* atau pengelola sebagai *agent*. Para ahli teori agensi berpendapat bahwa baik *principal* maupun *agent* memiliki kepentingan masing-masing dan dari kepentingan tersebut sering kali menimbulkan perbedaan sudut pandang antara keduanya (*divergence of interest*). (Lukviarman. 2016)

Di dalam teori agensi disebutkan adanya asimetri informasi antara manajer dan pemegang saham disebabkan karena manajer lebih mengetahui kondisi internal di sebuah perusahaan dibandingkan pemegang saham. Manajer memiliki motivasi lebih untuk memenuhi kepentingannya sendiri begitu juga dengan para pemegang saham yang memiliki kepentingan untuk meningkatkan kemakmurannya. Hal ini menyebabkan adanya *conflict of interest*, akibat dari kejadian tersebut maka muncul *agency cost*. Salah satu cara untuk menekan atau mengurangi *agency cost* adalah dengan

keberadaan srtuktur organisasi yang jelas, sehingga dapat menciptakan sistem yang efisien untuk mengatur hubungan kerja sama antara *agent* dan *principal*. kai

2.1.2 Penghindaran Pajak (*tax avoidance*)

Penghindaran Pajak adalah upaya yang dilakukan dengan memenuhi semua ketentuan perpajakan yang berlaku dan menggunakan strategi di bidang perpajakan. Penghindaran pajak ini dilakukan karena banyak wajib pajak badan maupun pribadi merasa terbebani untuk membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut wajib pajak berusaha untuk meringankan kewajiban pemabayaran pajak dengan cara meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar (Dewi dan Sari 2015). Pada dasarnya tindakan penghindaran pajak merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi hal ini diperbolehkan untuk di lakukan, akan tetapi tentu pemerintah tidak mengharapkan hal tersebut karena dapat mengurangi pendapat negara, tetapi di satu sisi penghindaran pajak ini selalu dilakukan oleh individu maupun badan asalkan tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Adapun cara yang digunakan untuk menghindari pajak dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan menurut Merks (2007) dalam (Dewi dan Sari 2015).:

- a. Memindahkan subjek atau objek pajak ke negara – negara yang mempunyai perlakuan pajak khusus atau keringanan khusus (*tax haven country*) atas suatu jenis pendapatan atau penghasilan.

- b. Usaha penghindaran pajak yang dilakukan dengan tetap mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*).
- c. Penghindaran pajak atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation (specificanti tax avoidance rule)*, serta transaksi yang tidak memiliki substansi dari sebuah bisnis.

Dari beberapa cara yang dilakukan oleh wajib pajak upaya yang sering dilakukan adalah dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Umumnya perencanaan pajak mengacu pada proses merencanakan usaha dan wajib pajak supaya hutang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika kita melihat dari definisi penghindaran pajak maka tindakan tersebut masih dalam lingkup peraturan perpajakan yang berlaku. Berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) tindakan ini sudah termasuk kedalam tindakan penghindaran pajak yang ilegal yang mengarah pada pelolosan diri dalam pembayaran pajak, cara yang dilakukan tentu dengan menabrak berbagai aturan sehingga sifatnya melawan hukum. Akan tetapi meskipun seperti itu baik *tax avoidance* ataupun *tax evasion* merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Keduanya sama-sama melakukan tindakan yang dapat menciderai moral, sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi banyak pihak.

2.1.3 Insentif Eksekutif

Insentif eksekutif merupakan cara yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi para eksekutif agar dapat bekerja dan mencapai tujuan perusahaan yang sudah ditetapkan. Insentif eksekutif merupakan salah satu bentuk dari penghargaan yang diberikan oleh pemegang saham agar bekerja sesuai dengan tujuan perusahaan agar tercipta (*goal congruance*). Tujuan lainnya adalah untuk menekan asimetri informasi yang ada didalam sebuah perusahaan

Standar insentif yang diberikan kepada eksekutif di Indonesia tidak memiliki aturan yang baku. Besaran dan cara penghitungannya tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing, sehingga antar perusahaan memiliki variasi dalam penentuan insentif yang diberikan. Insentif di Indonesia mencakup gaji atau honorarium, tunjangan, dan bonus atau tantiem. Gaji dan tunjangan memiliki sifat yang tetap sedangkan bonus perhitungannya tergantung pada kebijakan perusahaan. Bonus atau tantiem tentu akan diberikan apabila eksekutif dapat mencapai target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Jika insentif yang diberikan hanya berupa gaji dan tunjangan tentu tidak akan meningkatkan motivasi para eksekutif, lain halnya dengan bonus, bonus tentu akan membuat eksekutif bertindak oportunistik untuk mendapatkannya.

2.1.4 Risiko Perusahaan (*Corporate Risk*)

Risiko perusahaan adalah suatu kondisi dimana kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan kinerja suatu perusahaan menjadi lebih rendah dari yang

diharapkan diakibatkan karena ketidak pastian dimasa yang akan datang (Dewi dan Sari 2015). Dalam penelitian (Paglivora 2010) menjelaskan risiko perusahaan merupakan volatilitas *earning* perusahaan, yang dapat diukur dengan rumus deviasi standar. Dengan demikian dapat diartikan bahwa risiko perusahaan merupakan sebuah penyimpangan atau deviasi satandar dari *earning* baik penyimpangan yang bersifat kurang dari yang direncanakan (*down risk*) atau lebih dari yang direncanakan (*upsite potential*). Semakin besar deviasi *earning* dalam perusahaan semakin besar pula risiko perusahaan. Risiko perusahaan tentu dapat dilihat dari karakter eksekutif perusahaan itu sendiri. Eksekutif memiliki 2 karakter yaitu *risk taker* dan *risk averse*, eksekutif yang memiliki karaktaer *risk taker* adalah yang berani mengambil keputusan yang beresiko tinggi terhadap perusahaan sedangkan *risk averse* memiliki kecenderungan untuk menghindar atau tidak menyukai risiko sehingga kurang berani mengambil keputusan (Budiman dan Setioyono 2012).

Tinggi atau rendahnya risiko perusahaan dapat menentukan karakter eksekutif dalam perusahaan sehingga karakter tersebut memiliki pengaruh terhadap kebijakan yang dilakukan oleh eksekutif kaitnya dengan pembayaran pajak.

2.1.5 Corporate Governance

Untuk mengurangi *agency problem* yang ada di perusahaan maka diperlukan suatu tata kelola yang baik dalam perusahaan. Tata kelola (*corporate govenance*) adalah suatu mekanisme atau alat yang digunakan untuk menegakan prinsip pengendalian dan saling mengawasi antara pemilik perusahaan dan agen. Penerapan

corporate governance di perusahaan diharapkan mampu meningkatkan performa perusahaan itu sendiri. Ada 5 prinsip *corporate governance* yang paling umum yaitu keterbukaan, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, serta kesetaraan dan kewajaran. Jika didefinisikan maka :

Prinsip-prinsip *Corporate Governance*

1. Keterbukaan (*transparancy*)

Di era globalisasi seperti ini perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap dan mudah di akses oleh berbagai kalangan untuk meningkatkan performa perusahaan. Informasi yang lengkap dan mudah dipahami tentu dapat memudahkan para pemegang saham untuk menentukan arah kebijakan dalam pengambilan keputusan.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas dapat diartikan kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban di dalam elemen perusahaan. Jika prinsip ini dilakukan maka akan ada kejelasan antara hak dan kewajiban, serta wewenang antara pemegang saham, dewan komisaris, direksi, dan auditor

3. Tanggung jawab (*Responsibility*)

Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif dari pemegang saham, dewan komisaris dan auditor. Tanggungjawab tentu sangat penting karena perusahaan harus mampu mempertanggungjawabkan segala kinerja yang telah dilakukan. Hal ini tidak lain untuk mencapai tujuan perusahaan itu sendiri. Bentuk

dari tanggungjawab ini adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku.

4. Kemandirian (*Independency*)

Prinsip ini menjelaskan bahwa perusahaan harus dikelola dengan professional tanpa ada kepentingan dan intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku .

5. Kewajaran (*fairness*)

Prinsip ini mengisyaratkan harus ada keadilan dalam pemenuhan hak antara pemegang saham minoritas maupun pemegang saham mayoritas dengan memperhatikan asas kewajaran dan kesetaraan. Prinsip ini dilakukan agar dapat melindungi semua elemen yang ada dalam perusahaan.

2.1.6 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Saham Institusional adalah prosentase saham yang dimiliki sebuah institusi dan kepemilikan *blockholder*, yaitu kepemilikan individu atau atas nama perorangan diatas 5% tetapi tidak termasuk dalam kepemilikan *insider* atau manajerial institusi dapat dibedakan menjadi 2 golongan yaitu investor aktif dan investor pasif (Pohan et al. 2009). Keberadaan kepemilikan investor-investor institusional akan mampu mengawasi kinerja insider (Jensen dan Meckling 1976). Struktur kepemilikan saham pada perusahaan publik dapat digolongkan menjadi 3 yaitu kepemilikan perorangan, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial yang didalamnya termasuk eksekutif perusahaan (Pohan et al. 2009). Jika dikaitkan

dengan penghindaran pajak maka kepemilikan institusional yang tinggi pada suatu perusahaan akan membuat intensitas pengawasan juga semakin tinggi. Pengawasan yang tinggi tentu akan mencegah penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen. Karena manajemen hanya memiliki orientasi jangka pendek untuk meningkatkan performa perusahaan untuk mengejar insentif.

2.1.7 Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan bukan pegawai perusahaan tersebut akan tetapi langsung berurusan dengan organisasi perusahaan tersebut. Tugas utama dari komisaris independen adalah untuk mengawasi jalannya organisasi dalam sebuah perusahaan, selain itu komisaris independen berperan sebagai penengah atau penghubung antara pemegang saham dengan agen untuk mengurangi konflik antara keduanya. Dapat dikatakan bahwa komisaris independen memiliki tugas untuk merepresentasikan kepentingan pemegang saham minoritas, atau pemegang saham publik. Pemegang saham publik cenderung mentaati peraturan perpajakan, karena mengharapkan perusahaan berperan serta dalam pembangunan bagi masyarakat. Dengan adanya tanggungjawab terhadap kepentingan pemegang saham publik, maka komisaris independen diharapkan akan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan, sehingga mencegah praktik penghindaran pajak(Puspita and Harto 2014).

2.1.8 Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang anggotanya dapat diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. yang bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan komponen penting yang harus ada dalam perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Indonesia, oleh karena itu perusahaan diharuskan untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Keberadaan komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada para pemegang saham dan stakeholder lainnya (Winata 2014).

Tugas utama dari komite audit meliputi pemeriksaan dan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh perusahaan termasuk didalamnya pemeriksaan dan pengawasan pada proses penyusunan laporan keuangan. Komite audit juga berkaitan erat dengan pemeriksaan terhadap risiko yang ada di perusahaan. Dengan demikian maka komite audit dapat mengurangi tindakan kecurangan yang bisa dilakukan oleh agen dalam kaitanya terhadap tindakan penghindaran pajak.

2.1.9 Kualitas Audit

Semakin tingginya kebutuhan informasi yang transparan dan akuntabel di dalam sebuah perusahaan, menuntut para auditor harus memiliki integritas dan kompetensi yang baik. Hal ini sejalan dengan prinsip *corporate governance* yaitu transparansi.

Salah satu yang dilihat oleh investor terkait dengan laporan keuangan adakah kualitas audit itu sendiri. Audit yang berkualitas baik tentunya berasal dari proses yang independen dan dilakukan oleh auditor yang memiliki *expert*. Di dunia audit, nama KAP *big four* sudah tidak asing lagi. KAP *big four* memiliki reputasi yang cukup baik. Jika dikaitkan dengan penghindaran pajak maka tentunya perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four* akan berusaha bersifat transparan dan akan sulit untuk melakukan manipulasi dalam laporan keuangan yang berkaitan dengan pajak.

2.1.10 Konservatisme Akuntansi

Menurut FASB *Stament of Concept* No.2 konservatisme adalah reaksi hati-hati untuk menghadapi ketidakpastian dan risiko terhadap situasi bisnis telah dipertimbangkan di masa yang akan datang. Reaksi hati-hati ini berdampak terhadap komitmen manajemen untuk memberi informasi terkait laporan keuangan yang transparan akurat dan tidak menyesatkan adalah faktor yang menentukan tingkat konservatisme akuntansi di pelaporan keuangan perusahaan. Hal ini dapat mempengaruhi pada laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan, dimana laporan keuangan yang telah di susun tersebut akan dijadikan acuan dalam penentuan kebijakan atau pengambilan keputusan. Kebijakan yang dimaksud tentunya akan terkait dengan kebijakan perpajakan perusahaan khususnya *tax avoidance* (Pramudito dan Sari 2015).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diringkas dan ditampilkan pada table berikut :

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Kesimpulan
1	Dewi dan Sari (2015)	Dependen: <i>Tax avoidance</i> Independen: 1. Insentif Eksekutif 2. Corporate Risk 3. Kepemilikan Istitusional 4. Komisaris Independen 5. Komite Audit 6. Kualitas Audit	1. Corporate Risk berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> 2. Insentif Eksekutif, Kepemilikan Istitusional, Komisaris Independen, Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 3. Sedangkan Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>
2	Sari, Kalbuana, dan Jumadi (2015)	Dependen: Penghindaran Pajak Independen: 1. Konservatisme Akuntansi 2. Kualitas Audit 3. Ukuran Perusahaan	1. Konservatisme Akuntansi dan Kualias Audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak 2. Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak
3	Pramudito dan Sari (2015)	Dependen: Penghindaran Pajak Independen: 1. konservatisme akuntansi 2. kepemilikan manajerial 3. Ukuran dewan komisaris.	1. Konservatisme Akuntansi dan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 2. Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>

4	Sandy dan Lukviarman (2008)	Dependen: <i>Tax avoidance</i> Independen 1. Komisaris Independen 2. Kualitas Audit 3. Komite Audit 4. Kepemilikan Institusional	1. Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. Sedangkan Kepemilikan Institusional tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
5	Dewi dan Jati (2014)	Dependen: <i>Tax avoidance</i> Independen: Independen: 1. Risiko perusahaan 2. Ukuran perusahaan 3. <i>multinational company</i> 4. Kepemilikan institusional 5. Komisaris independen 6. kualitas audit 7. komite audit	1. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa risiko perusahaan, kualitas audit dan komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> 2. Sedangkan <i>multinational company</i> , kepemilikan institusional, dan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
6	Armstrong et al. (2015)	Dependen: <i>Tax avoidance</i> Independen: 1. Tax aggressiveness 2. FIN 48 3. <i>tax avoidance</i> 4. CEO incentives 5. corporate governance	1. Terdapat hubungan positif antara independensi dewan dan kecanggihan finansial untuk tingkat penghindaran pajak yang rendah, namun hubungan negatif untuk penghindaran pajak tingkat tinggi. 2. Atribut tata kelola berpengaruh positif memiliki hubungan

			yang lebih kuat dengan tingkat penghindaran pajak yang lebih ekstrem
7	Sarra et al. (2014)	<p>Dependen: Penghindaran Pajak</p> <p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konservatisme Akuntansi 2. Komisaris independen 3. Komite audit 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam penelitian ini menunjukkan variabel Konservatisme akuntansi, berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> 2. Dalam penelitian ini menunjukkan variabel komisaris independen, tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 3. Sedangkan variabel Komite Audit berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>
8	Winata (2014)	<p>Dependen : <i>Tax avoidance</i></p> <p>Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan Institusional 2. Komisaris independen 3. Komite audit 4. Kualitas audit 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil dari penelitian ini menunjukkan variabel kepemilikan institusional dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 2. Variabel komisaris independen dan komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Insentif Eksekutif Terhadap *Tax avoidance*

Penelitian yang dilakukan oleh (Dewi dan Sari 2015) menjelaskan bahwa insentif eksekutif berkaitan erat hubungannya dengan teori agensi. Konflik kagenan yang melibatkan antara *principal* dan *agent*. Insentif eksekutif merupakan penghargaan yang diberikan oleh perusahaan kepada eksekutif agar termotivasi untuk mengelola perusahaan mencapai tujuan.

Dengan adanya insentif tersebut diharapkan bahwa eksekutif selalu memiliki motivasi untuk fokus terhadap pencapaian tujuan perusahaan dan menghindari perilaku yang dapat merugikan perusahaan. Maka dengan demikian insentif diharapkan mampu membuat eksekutif tidak melakukan kecurangan yang dalam kaitanya kecurangan terhadap kebijakan pajak perusahaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Farahmita 2012) menunjukkan bahwa insentif eksekutif berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat disimpulkan adalah :

H1: Insentif Eksekutif berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

2.3.2 Pengaruh *corporate risk* terhadap *tax avoidance*

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijak-kebijakan yang diambil oleh pemimpin atau eksekutif didalam perusahaan itu sendiri. Dimana pimpinan perusahaan tersebut sebagai

pengambil keputusan dan kebijakan terhadap perusahaan tentu memiliki karakter yang berbeda-beda. Seorang pemimpin perusahaan bisa menjadi *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan (Budiman 2012). Karakter eksekutif yang berbeda membuat eksekutif memiliki kepentingan yang berbeda juga. Dalam teori agensi kepentingan ini bisa jadi akan menimbulkan agency problem kedepannya apabila terjadi asimetri informasi antara *principal* dan *agent* mengenai kebijakan yang diambil terkait dengan risiko perusahaan. Dalam penelitian (Paglivora 2010) menjelaskan risiko perusahaan merupakan volatilitas *earning* perusahaan, yang dapat diukur dengan rumus deviasi standar. Dengan demikian dapat diartikan bahwa risiko perusahaan merupakan sebuah penyimpangan atau deviasi satandar dari *earning* baik penyimpangan yang bersifat kurang dari yang direncanakan (*down risk*) atau lebih dari yang direncanakan (*upsite potential*). Semakin besar deviasi *earning* dalam perusahaan semakin besar pula risiko perusahaan.

Pemimpin didalam perusahaan tentu memiliki peranan yang sangat penting di dalam pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan yang ada dalam perusahaan. Jika dikaitkan maka kebijakan yang dipengaruhi adalah kebijakan terkait dengan tingkat penghindaran pajak perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh menyebutkan bahwa Risiko perusahaan atau *corporate*

risk berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* (Dewi dan Jati 2014).

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat disimpulkan adalah :

H2: *Corporate Risk* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *tax avoidance*.

Besarnya tingkat kepemilikan saham pihak institusional tentu akan menentukan besarnya tingkat pengawasan terhadap pihak manajemen. Di dalam teori agensi disebutkan hubungan antara pemilik saham dan manajemen maka semakin tinggi saham yang dimiliki oleh pihak institusional secara otomatis akan membuat pengawasan yang tinggi terhadap perilaku manajemen didalam sebuah perusahaan. Kepemilikan institusional memiliki peran yang penting dalam perusahaan. dalam teori agensi dengan tingginya kepemilikan saham oleh pihak institusional, maka dapat mengurangi konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Sehingga masalah keagenan dapat dikurangi (Winata 2014). Pengawasan yang tinggi tentu akan mengurangi perilaku *opportunistic* dari pihak manajemen. Sehingga diharapkan pengawasan tersebut mampu mencegah pihak manajemen untuk membuat keputusan terkait penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Suardana 2014) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat disimpulkan adalah :

H3: Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.3.4 Pengaruh Komisaris Independen terhadap *tax avoidance*.

Komisaris independen memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan fungsi penendalian dan pengawasan terhadap jalanya perusahaan dan memastikan bahwa *corporate governance* sudah dilakukan di dalam perusahaan. Teori agensi menyebutkan bahwa salah satu cara mengurangi asimetri informasi adalah dengan membentuk dewan komisaris yang merupakan perpanjangan tangan dari pemilik saham. Komisaris independen berasal dari kalangan luar perusahaan dan tidak memiliki hubungan dengan pemegang saham utama, jajaran direksi dan dewan komisaris lainnya. Maka dari itu komisaris independen memiliki peran yang penting untuk mengawasi jalanya perusahaan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mampu mendeteksi perilaku penyimpangan atau kecurangan. Dengan adanya tanggungjawab terhadap kepentingan pemegang saham publik, maka diharapkan komisaris independen akan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan, sehingga mencegah praktik penghindaran pajak (Puspita dan Harto 2014). Penelitian yang dilakukan oleh (Suardana 2014) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat disimpulkan adalah :

H4 : Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.3.5 Pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.

Komite audit memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap proses penyusunan pelaporan keuangan dan tugas pengendalian internal didalam perusahaan. Sandy dan Lukviarman (2008) menyebutkan bahwa komite audit mutlak harus ada dalam perusahaan yang menerapkan *good corporate govrnance* mengingat pentingnya tugas dari komite audit terhadap kelangsungan perusahaan Di dalam *corporate governance* terdapat prinsip akuntabilitas,hal ini dimaksudkan agar setiap unsur-unsur yang ada dalam laporan keuangan diungkapkan dapat di informasikan secara *akuntable* selain itu pembentukan komite audit juga diharapkan mampu mengurangi *agency problem* dalam perusahaan. Dalam teori agensi menjelaskan *agency problem* tentu diakibatkan adanya asimetri informasi. Agar prinsip tersebut dapat terpenuhi maka komite audit harus bekerja secara optimal. Di dalam penelitiannya (Pohan et al. 2009) menjelaskan perusahaan yang memiliki anggota komite audit yang sedikit cenderung bertindak lebih efisien, namun memiliki kelamahan minimnya ragam pengalaman anggota. Maka dari itu penting memiliki komite audit yang memiliki integritas dan kompetensi yang baik agar proses pemeriksaan dan pengawasan dapat berjalan baik dan mampu meminimalisir penyimpangan terhadap penghindaran pajak. Dewi dan Jati (2014) di dalam penelitiannya menyebutkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat disimpulkan adalah :

H5 : Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.3.6 Pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*.

Audit merupakan komponen penting di dalam *corporate governance* yang erat kaitannya dengan salah satu prinsip *corporate governance* yaitu transparansi. Perusahaan publik semakin menuntut adanya transparansi pada laporan keuangan. Tingkat transparansi yang baik juga berdampak minat investor untuk menanamkan modal atau saham di dalam perusahaan (Winata 2014). Audit yang berkualitas tentunya berasal dari proses yang independen dan dilakukan oleh auditor yang memiliki *expert*. Di dunia audit, nama KAP *big four* sudah tidak asing lagi. KAP *big four* memiliki reputasi yang cukup baik. Jika dikaitkan dengan penghindaran pajak maka tentunya perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four* akan berusaha bersifat transparan dan akan sulit untuk melakukan manipulasi dalam laporan keuangan yang berkaitan dengan pajak. (Sandy dan Lukviarman 2008) menyebutkan dalam penelitiannya bahwa kualitas audit berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat disimpulkan adalah :

H6 : Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

2.3.7 Pengaruh Konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance*.

Menurut FASB *Stament of Concept* No.2 konservatisme adalah reaksi hati-hati untuk menghadapi ketidakpastian dan risiko terhadap situasi bisnis telah dipertimbangkan di masa yang akan datang. Konservatisme akuntansi memiliki

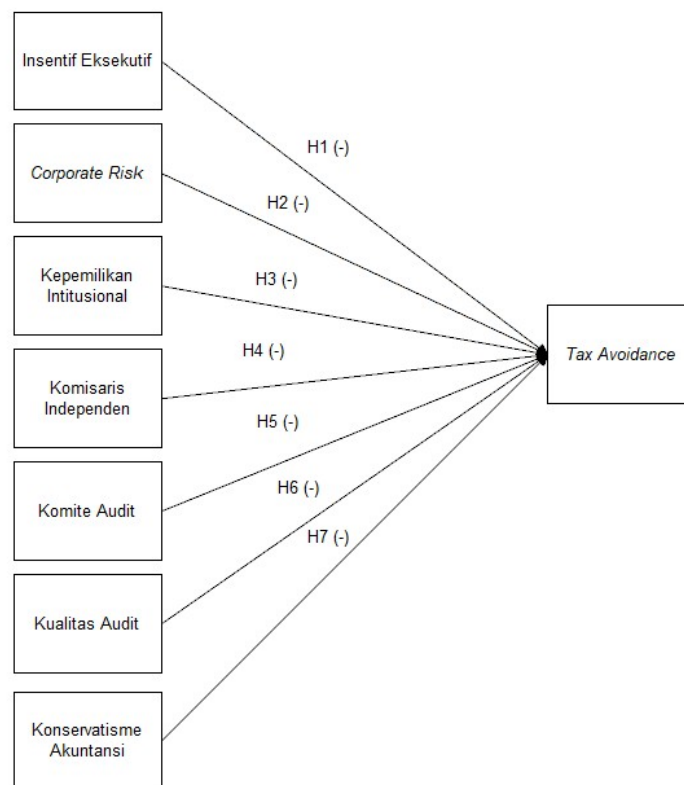
manfaat atau peranan di dalam teori keagenan yang paling efisien yang bisa membatasi konflik keagenan. Di dalam aktivitasnya seringkali perilaku *agent* meningkatkan kesejahteraannya sendiri. Konservatisme akuntansi dapat mencegah asimetri informasi dengan cara membatasi agen untuk melakukan praktik manipulasi di dalam laporan keuangan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Tresno 2012) dengan adanya Peraturan Perundang-undangan yang dibuat Pemerintah maka kecenderungan untuk melakukan praktik penghindaran pajak akan semakin sulit meskipun perusahaan memilih menggunakan metode akuntansi yang sifatnya konservatif. Sehingga Perusahaan yang menerapkan konservatisme akuntansi akan mendapatkan tingkat keagresifitasan pajak yang rendah. Di dalam penelitian yang dilakukan oleh (Sarra et al. 2014) menyebutkan adanya pengaruh negatif signifikan konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat disimpulkan adalah :

H7: Konservatisme Akuntansi berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan hipotesis yang telah dibuat maka peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat dimaknai sebagai metode penelitian yang digunakan untuk bahan penelitian pada populasi dan sampel tertentu. Analisis data yang memiliki sifat kuantitatif atau statistik, yang memiliki tujuan untuk menguji sampel atau responden dari hipotesis yang sudah dirumuskan. (Sugiyono 2012). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak ada sektor pertambangan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2012-2017.

3.2 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yang digunakan untuk menentukan sampel dijelaskan antara lain:

1. Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2017
2. Perusahaan Pertambangan yang tidak mengalami kerugian selama periode 2012-2017.

3. Perusahaan yang memiliki kelengkapan data yang diperlukan untuk penelitian.
4. Perusahaan Pertambangan yang menggunakan satuan mata uang Rupiah selama periode 2012-2017.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan yang sudah diaudit dan laporan tahunan perusahaan yang didapatkan dengan mengakses website Bursa Efek Indonesia (*www.idx.co.id*), dalam penelitian ini data diperoleh melalui sumber yang ada pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI selama periode 2012-2017 dengan mengakses website IDX tahun 2012-2017, kemudian peneliti memilih dan mengumpulkan data-data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3.4 Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Pada penelitian ini, variabel yang diteliti menggunakan indikator-indikator pada penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah *tax avoidance* sedangkan variabel independen adalah insentif eksekutif, *corporate risk*, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan konservatisme akuntansi.

3.4.1 *Tax avoidance*

Penghindaran Pajak adalah upaya yang dilakukan dengan memenuhi semua ketentuan perpajakan yang berlaku dan menggunakan strategi di bidang perpajakan. Penghindaran pajak ini dilakukan karena banyak wajib pajak badan maupun pribadi merasa terbebani untuk membayar pajak.

Tax avoidance dapat diukur menggunakan banyak cara salah satunya adalah dengan menggunakan total BTD (*book-tax-differences*). Dalam penelitian ini menggunakan perhitungan yang telah dilakukan oleh (Gebhart 2017) menggunakan BTD sebagai alat untuk mengukur *tax avoidance*. Rumus yang dimaksud adalah :

$$\text{Total BTD} = \text{Laba sebelum pajak} - (\text{beban pajak} / \text{tarif pajak})$$

BTD menggambarkan selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal. Perbedaan yang besar antara laba akuntansi dengan penghasilan kena pajak di perusahaan pada umumnya menunjukkan tingkat perilaku penghindaran pajak atau agresifitas pajak yang lebih besar. Data-data yang diperlukan untuk mencari total BTD dapat dilihat pada laporan laba/rugi perusahaan yang telah diaudit dan *tax rate* atau tarif pajak untuk wajib pajak badan sejak tahun 2010 sebesar 25%.

3.4.2 Insentif eksekutif

Insentif eksekutif merupakan salah satu bentuk dari penghargaan yang diberikan oleh pemegang saham agar bekerja sesuai dengan tujuan perusahaan agar tercipta (*goal congruance*). Insentif di Indonesia mencakup gaji atau honorarium, tunjangan, dan bonus atau tantiem.

Variabel Insentif eksekutif dalam penelitian ini menggunakan alat ukur yang digunakan oleh (Armstrong et al. 2015) yaitu dengan menghitung total insentif berupa gaji, tunjangan, dan bonus yang diperoleh oleh eksekutif selama satu tahun dibagi dengan hasil penjualan perusahaan. Data insentif tersebut didapatkan dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah diaudit.

3.4.3 Corporate Risk

Dalam penelitian (Paglivora 2010) menjelaskan risiko perusahaan merupakan volatilitas *earning* perusahaan, yang dapat diukur dengan rumus deviasi standar. Dengan demikian dapat diartikan bahwa risiko perusahaan merupakan sebuah penyimpangan atau deviasi satandar dari *earning* baik penyimpangan yang bersifat kurang dari yang direncanakan (*down risk*) atau lebih dari yang direncanakan (*upsite potential*). Semakin besar deviasi *earning* dalam perusahaan semakin besar pula risiko perusahaan.

Untuk mengukur risiko perusahaan dapat dihitung menggunakan deviasi standar dari EBITDA (*earning before interest tax, depreciation and amortization*) di bagi dengan total aktiva perusahaan (Paglivora 2010).

$$RISK = \sqrt{\frac{\sum_{T-1}^T (E - 1/T \sum_{T-1}^T E)^2}{T-1}}$$

Dimana E adalah EBITDA dibagi dengan total aktiva perusahaan.

3.4.4 Kepemilikan Institusional

Besarnya tingkat kepemilikan saham pihak institusional tentu akan menentukan besarnya tingkat pengawasan terhadap pihak manajemen. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki baik pemerintah, investor, debitor, bank-bank, perusahaan asuransi, maupun perusahaan investasi kecuali kepemilikan yang bersifat individual. (Khurana dan Moser 2009) memperlihatkan penghitungan kepemilikan institusional dengan indikator presentase jumlah saham yang dimiliki institusi dibagi dengan jumlah saham beredar.

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Total kepemilikan saham oleh pihak institusi}}{\text{Jumlah saham beredar}}$$

3.4.5 Komisaris Independen

Komisaris independen memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya sebuah organisasi. Komisaris independen tidak memiliki afiliasi dengan pihak manapun didalam sebuah perusahaan. komisaris independen harus mampu menjaga independensinya dalam melihat jalannya sebuah perusahaan agar tercipta situasi *check and balances* di dalam perusahaan. Dalam penelitian (Sandy dan Lukviarman 2008) menggunakan indikator pengukuran dengan rumus :

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}}$$

Jumlah anggota dewan komisaris dapat dilihat pada laporan keuangan tahunan perusahaan pada bagian tata kelola perusahaan di bagian struktur dewan komisaris.

3.4.6 Komite Audit

Komite audit memiliki peran atau tugas yang penting di dalam perusahaan. Peran komite audit adalah memeriksa dan mengawasi seluruh aktivitas pada saat proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal dalam perusahaan. Perusahaan yang sudah terdaftar di BEI sekurang-kurangnya harus memiliki 3 orang yang tergabung dalam komite audit.

(Sarra et al. 2014) dalam penelitiannya mengukur variabel komite audit dengan menghiung jumlah anggota komite audit yang ada dalam perusahaan.

3.4.7 Kualitas Audit

Dalam penelitian ini, pengukuran kualitas audit dilakukan melalui perusahaan yang menggunakan jasa dari KAP *big four*. Hal ini didasarkan pada reputasi KAP tersebut yang sudah mendunia. Variabel kualitas audit diukur menggunakan variabel *dummy*. Dengan melihat sampel perusahaan yang menggunakan jasa KAP *big four* yaitu KPMG, *Price Waterhouse Cooper (PWC)*, *Ernest & Young* dan *Deloitte Touche Tohmatsu* akan diberi nilai 1 sedangkan yang tidak akan diberi nilai 0 (Dewi and Sari 2015).

3.4.8 Konservatisme Akuntansi

Konservatisme akuntansi terkait dengan melaporkan pandangan yang paling tidak optimis saat menghadapi ketidakpastian pengukuran, hal ini sering menjadi masalah. Hal yang paling sering terjadi pada saat penggunaan konsep konservatisme akuntansi adalah keuntungan tidak diakui sampai benar-benar terjadi. Sehingga konservatisme akuntansi dapat menentukan kualitas laba (Sarra et al. 2014)

Pengukuran konservatisme akuntansi menggunakan model penelitian yang sudah dilakukan (Pramudito and Sari 2015) dengan rumus :

$$\text{Konservatisme Akuntansi} = \frac{\text{Laba bersih} - \text{Arus Kas Operasi}}{\text{Total Asset}}$$

Data data mengenai konservatisme akuntansi dapat dilihat pada laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1. Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2012), statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis atau mengolah data dengan cara mendeskripsikan data yang telah didapat sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, perhitungan nilai rata-rata (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi.

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik terhadap model regresi digunakan agar dapat mengetahui apakah model regresi tersebut merupakan model regresi yang layak atau tidak (Ghozali, 2011). Dalam uji asumsi klasik beberapa uji yang perlu dilakukan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

3.5.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi, variable residual atau pengganggu memiliki distribusi data secara normal.

Caranya ialah dengan melihat histogram dari residualnya, atau bisa juga melihat penyebaran data yang ada pada sumbu diagonal dari grafik.

3.5.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas memiliki tujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Menurut penelitian oleh Ghozali (2011), untuk melihat atau mendeteksi adanya multikolonieritas dalam suatu model regresi dapat dilihat melalui nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) nya, menggunakan dasar seperti berikut ini. Apabila nilai *tolerance* < 0.1 dan nilai VIF > 10 , maka akan terjadi masalah multikolonieritas yang berarti model regresi tersebut tidak baik, sebaliknya jika nilai *tolerance* > 0.1 dan nilai VIF < 10 maka model regresi tersebut baik dan tidak terjadi multikolonieritas.

3.5.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan uji yang dilakukan untuk menguji dan mengetahui adanya korelasi pada varians eror antar periode ke periode dari berbagai penelitian. Dalam uji ini, menggunakan Durbin-Watson (DW) yang dihasilkan dari pengujian yang telah dilakukan. Kriterianya adalah apabila angka DW $> +2$ berarti ada autokorelasi positif, lalu angka DW diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi, serta apabila angka DW dibawah -2 berarti autokorelasinya negatif.

3.5.2.4 Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi tidak terjadi kesamaan residual dari satu periode pengamatan ke periode pengamatan lain. Dengan tidak adanya heteroskedastisitas di suatu model regresi, atau biasa disebut dengan homoskedastisitas yang diuji menggunakan *scatterplot*. Menurut Ghozali (2011) yang biasa digunakan sebagai dasar untuk menguji heteroskedastisitas adalah: (1) jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergabung, melebar, kemudian menyempit), maka ada indikasi telah terjadi heteroskedastisitas, (2) jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6 Pengujian Hipotesis

3.6.1 Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan persamaan regresi berganda untuk menganalisis pengaruh insentif eksekutif, corporate risk, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit dan konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2017. Model persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + b_7X_7 + e$$

Keterangan :

Y = Penghindaran pajak a = Harga konstanta (harga Y

bila X=0) $b_1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ = Harga koefisien regresi

X1 = Variabel Insentif Eksekutif

X2 = Variabel *corporate risk*

X3 = Variabel Kepemilikan Institusional

X4 = Variabel Komisaris Independen

X5 = Variabel Komite Audit

X6 = Variabel Kualitas Audit

X7 = Variabel Konservatisme Akuntansi $e = \textit{standard error}$

3.6.2 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Penelitian yang dilakukan oleh Ghozali (2011) menyampaikan bahwa yang digunakan untuk pengukuran seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variable independen adalah koefisien determinasi (R²). Penilaian koefisien determinasi yaitu antara 0 dan 1. Kelemahan yang mendasar pada koefisien determinasi yaitu terjadinya bias pada jumlah variable independen, maka penelitian ini menggunakan nilai Adjusted R² pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Nilai *Adjusted R²* dapat naik atau turun apabila satu

variabel independen ditambahkan ke dalam model. Apabila dalam uji empiris terdapat *Adjusted R2* bernilai negatif, maka nilai *Adjusted R2* dianggap bernilai nol.

3.6.3 Uji F / Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit*)

Uji F digunakan untuk melakukan uji H_0 dimana data empiris sesuai dengan model regresinya, yang berarti tidak terdapat perbedaan antara data dengan model sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi tersebut cocok atau fit. Pengambilan keputusan uji kelayakan model adalah: (a) Jika nilai goodness of fit statistic $> 0,05$ maka H_0 diterima yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga model penelitian yang diestimasi belum layak digunakan. (b) Jika nilai goodness of fit statistic $< 0,05$ maka H_0 ditolak yang berarti model mampu memprediksi nilai observasinya sehingga model penelitian yang diestimasi layak digunakan.

3.6.4 Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan untuk melihat dan menguji seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen yang digunakan secara individual dalam menjelaskan variabel-variabel dependen. Dapat dilakukan uji t apabila nilai signifikansi t pada masing-masing variable yang ada pada output hasil regresi menggunakan SPSS memiliki tingkat significant level 0.05 ($\alpha = 5\%$). Diputuskan bahwa H_0 ditolak apabila signifikan $t \geq 0.05$, sedangkan ditingkat signifikan itu juga H_a diterima yang berarti secara individual variable independen tidak berpengaruh signifikan

pada variable independen. Diputuskan H_0 diterima apabila signifikan $t \leq 0.05$, sedangkan H_a ditolak yang berarti secara individual variabel independen berpengaruh signifikan pada variabel independen.

BAB IV

ANALISIS DATA & PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Metode pengumpulan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi, dimana metode ini dilakukan dengan melihat dan mengumpulkan data dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan tahunan Perusahaan sektor Pertambangan yang terdaftar pada tahun 2012-2017. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* yang sudah dijelaskan dalam bab tiga. Sampel penelitian yang masuk dalam kriteria sebanyak 5 perusahaan. Sampel yang sudah didapat kemudian dilakukan untuk analisis data dan hipotesis. Distribusi sampel dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 4. 1 Kriteria Sampel Pada Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI pada periode 2012-2017	41
2	Perusahaan Pertambangan yang tidak memiliki kelengkapan data selama periode 2012-2017	(5)
3	Perusahaan Pertambangan yang mengalami kerugian selama periode 2012-2017	(7)
4	Perusahaan Pertambangan yang tidak menggunakan satuan mata uang rupiah selama periode 2012-2017	(24)
	Jumlah Sampel Perusahaan	5

Sumber data Sekunder yang diolah 2018

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4. 2 Tabel Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tax_Avoidance	30	-4.E+11	2.E+11	-.2.68E+10	1.337E+11
Insentif_Eksekutif	30	.0002	.0393	.010427	0.115368
Corporate_Risk	30	.0002	.2496	.04113	.0596450
Kepemilikan_Institusional	30	.3992	.6833	.5743329	.1041738
Komisaris_Independen	30	.3333	0.5	.36889	.0596450
Komite_Audit	30	2.0	4.00	3.333	.66089
Kualitas_Audit	30	.00	1.00	.6000	.49827
Konservatisme_Akuntansi	30	-.18719	.13516	-.0250411	.07140444
Valid N (<i>listwise</i>)	30				

Sumber: Output yang diolah menggunakan IBM SPSS Statistics 24 (2018)

Dari hasil analisis data di atas, maka dapat disimpulkan deskriptif masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

1. Insentif Eksekutif (X1) memiliki nilai minimum sebesar 0.0002 dan nilai maksimumnya sebesar 0.0393. Nilai rata-rata insentif eksekutif adalah sebesar 0.010427. Sedangkan standar deviasi sebesar 0.115368 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel insentif eksekutif adalah sebesar 0.115368 dari 30 sampel yang digunakan.
2. *Corporate risk* (X2) memiliki nilai minimum sebesar 0.0002 dan nilai maksimumnya sebesar 0.2496. Nilai rata-rata *corporate risk* adalah sebesar 0.04113. Sedangkan standar deviasi sebesar 0.0596450 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel *corporate risk* adalah sebesar 0.0596450 dari 30 sampel yang digunakan.
3. Kepemilikan Institusional (X3) memiliki nilai minimum sebesar 0.3992 dan nilai maksimumnya sebesar 0.6833. Nilai rata-rata kepemilikan institusional

adalah sebesar 0.5473329. Sedangkan standar deviasi sebesar 0.1041738 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel kepemilikan institusional adalah sebesar 0.1041738 dari 30 sampel yang digunakan.

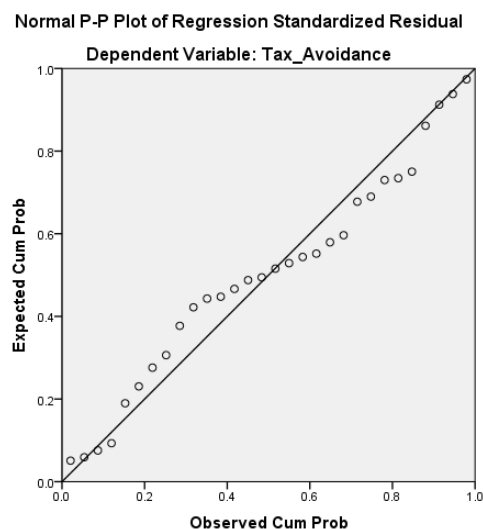
4. Komisaris independen (X4) memiliki nilai minimum sebesar 0.333 dan nilai maksimumnya sebesar 0.5. Nilai rata-rata komisaris independen adalah sebesar 0.36889. Sedangkan standar deviasi sebesar 0.0596450 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel komisaris independen adalah sebesar 0.0596450 dari 30 sampel yang digunakan.
5. Komite Audit (X5) memiliki nilai minimum sebesar 2 dan nilai maksimumnya sebesar 4. Nilai rata-rata komite audit adalah sebesar 3.333. Sedangkan standar deviasi sebesar 0.66089 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel komite audit adalah sebesar 0.66089 dari 30 sampel yang digunakan.
6. Kualitas Audit (X6) memiliki nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimumnya sebesar 1. Nilai rata-rata kualitas audit adalah sebesar 0.6. Sedangkan standar deviasi sebesar 0.49827 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel kualitas audit adalah sebesar 0.49827 dari 30 sampel yang digunakan.
7. Konservatisme akuntansi (X7) memiliki nilai minimum sebesar -0.18719 dan nilai maksimumnya sebesar 0.13516. Nilai rata-rata konservatisme akuntansi adalah sebesar -0.0250411. Sedangkan standar deviasi sebesar 0.07140444 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel konservatisme akuntansi adalah sebesar 0.07140444 dari 30 sampel yang digunakan.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk melihat kenormalan distribusi dalam model regresi pada variabel pengganggu atau variabel residual. Uji normalitas penting untuk dilakukan karena jika asumsi klasik dihilangkan, maka uji statistik menjadi tidak valid. Dalam penelitian ini Uji normalitas dapat dilihat melalui penyebaran data yang ada pada sumbu diagonal dari grafik.

Gambar 4. 1 Grafik Normal P-Plot



Berdasarkan grafik diatas, menunjukkan bahwa grafik plot berada disekitar garis dan tidak menjauhi dari garis diagonal. Dengan demikian kesimpulan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan tetdistribusi normal dan bisa dilakakukan penelitian lebih lanjut.

4.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen didalam model regresi yang dilakukan. Uji ini dapat dilakukan apabila terdapat lebih dari satu variabel independen dalam model regresi. Cara yang digunakan oleh peneliti untuk melihat ada atau tidaknya multikolinieritas pada model regresi adalah dengan melihat nilai *Tolerance* dan VIF (*variance inflation factor*). Model regresi yang baik tentu tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Nilai yang dapat menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas adalah nilai *tolerance* > 0.1 dan nilai VIF < 10.

Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 4. 3 Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Insentif Eksekutif	.320	3.121
<i>Corporate Risk</i>	.335	2.986
Kepemilikan Institusional	.384	2.605
Komisaris Independen	.645	1.550
Komite Audit	.453	2.209
Kualitas Audit	.333	3.003
Konservatisme Akuntansi	.651	1.537

Sumber: Output yang diolah menggunakan IBM SPSS Statistics 24 (2018)

Nilai VIF dan *tolerance* dalam tabel menunjukkan bahwa variabel bebas dalam model regresi tidak saling berkorelasi. Nilai VIF yang diperoleh untuk masing-masing variabel bebas kurang dari 10 dan nilai *tolerance* diatas 0.1. Maka dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi antar variabel bebas dalam model regresi dan tidak terjadi multikolinieritas diantara variabel bebas dalam model regresi.

4.3.3 Uji Autokorelasi

Uji ini memiliki tujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu atau variabel residual pada periode tertentu dengan variabel pengganggu pada periode sebelumnya. Uji ini muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu akan berkaitan satu sama lain.

Hasil Uji Autokorelasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 4 Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adj.R Square	Std.Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.784a	.615	.492	9.553E+10	1.165

Sumber: Output yang diolah menggunakan IBM SPSS Statistics 24 (2018)

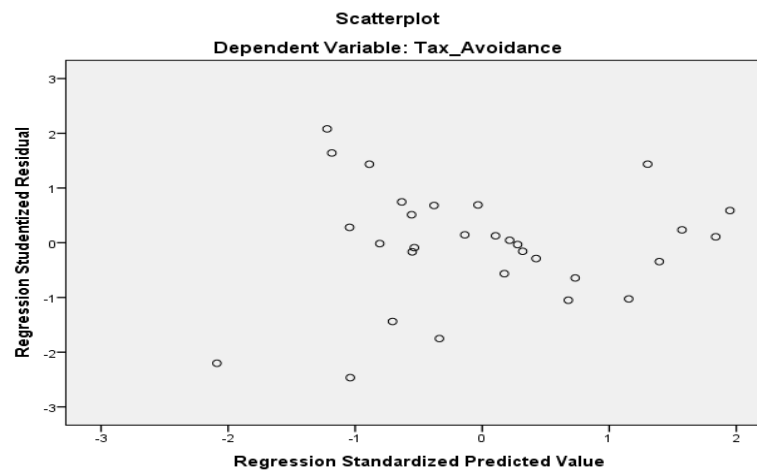
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai DW adalah sebesar 1.165. Nilai DU pada tabel Durbin Watson 2.034, Nilai DL 0.926. sehingga terjadi kategori $DL < DW < DU$ atau $0.926 < 1.165 < 2.034$. Dengan demikian model yang diajukan dalam penelitian ini

tidak mengambil keputusan terjadi atau tidaknya autokorelasi. Dari hasil tersebut kemudian dilakukan *run test* dan didapatkan hasil Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.139 yang berarti tidak terjadi autokorelasi karena Asymp. Sig. (2-tailed) > 0.05 .

4.3.4 Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedasitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari pengamatan residual satu ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedasitas dan jika berbeda disebut heteroskedasitas. Model regresi yang baik adalah model yang homoskedasitas. Untuk melihat ada tidaknya heteroskedasitas dapat kita lihat dari output SPSS melalui grafik *scatterplot* antara nilai prediksi yaitu ZPRED dengan residualnya SREID.

Gambar 4. 2 Hasil Uji Heteroskedasitas



Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas, menunjukkan bahwa gambar plot tersebar tidak membentuk pola yang teratur. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedasitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai.

4.4 Analisis Regresi Berganda

Untuk menganalisis dan menguji pengaruh insentif eksekutif, *corporate risk*, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan konservatisme akuntansi terhadap *Tax Avoidaance* digunakan analisis regresi linier berganda. Dalam model analisis regresi linier berganda akan diuji secara simultan uji F maupun secara parsial uji T. Ketentuan uji signifikansi uji F dan uji T sebagai berikut:

Ketentuan:

- H_0 : Jika probabilitas $(p) \geq 0,05$ artinya insentif eksekutif, *corporate risk*, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan konservatisme akuntansi secara simultan maupun parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- H_a : Jika probabilitas $(p) \leq 0,05$ artinya insentif eksekutif, *corporate risk*, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan konservatisme akuntansi secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Tabel 4. 5 Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	B	t hitung	Sig t	Keterangan
(Constant)	3.434E+11		.047	
Insentif Eksekutif	-3.960E+12	-1.461	.158	Gagal diterima
<i>Corporate risk</i>	3.218E+11	.627	.537	Gagal diterima
Kepemilikan Institusional	-3.133E+11	-1.142	.266	Gagal diterima
Komisaris Independen	-2.648E+11	-.705	.488	Gagal diterima
Komite Auditl	1.754E+10	.441	.664	Gagal diterima
Kualitas Audit	-2.349E+11	-3.815	.001	Diterima
Konservatisme akuntansi	-6.413E+11	-2.087	.049	Diterima
F hitung	5.012			
Sig F	0.002			
Adj. R square	0.492			

Sumber: Output yang diolah menggunakan IBM SPSS Statistics 24 (2018)

Berdasar hasil pengujian pada tabel diatas perhitungan regresi linear berganda menggunakan program SPSS didapat hasil sebagai berikut :

$$Y = 3.434E+11 - 3.960E+12X_1 + 3.218E+11X_2 - 3.133E+11X_3 - 2.648E+11X_4 + 1.754+10X_5 - 2.349E+11X_6 - 6.413+11X_7 + e$$

4.4.1 Koefisien Determinasi (adjust. R²)

Tabel 4. 6 Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adj.R Square	Std.Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.784a	.615	.492	9.553E+10	1.165

Sumber: Output yang diolah menggunakan IBM SPSS Statistics 24 (2018)

Besar insentif eksekutif, *corporate risk*, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan konservatisme akuntansi terhadap *Tax Avoidance* ditunjukkan oleh nilai Adjusted R Square sebesar 0.492 artinya 49.2% *Tax avoidance* dipengaruhi oleh insentif eksekutif, *corporate risk*, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan konservatisme akuntansi, sisanya 51.8% dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

4.4.2 Uji Regresi Simultan F

Tabel 4. 7 Uji F

Model	Sum of square	Df	Mean square	F	Sig.
1 Regression	3.188E+23	7	4.555E+22	5.012	.002 ^b
Residual	1.999E+23	22	9.088E+21		
Total	5.187E+23	29			

Sumber: Output yang diolah menggunakan IBM SPSS Statistics 24 (2018)

Berdasarkan analisis regresi berganda, di peroleh F-hitung sebesar 5.012 dengan probabilitas (p) = 0.002. Berdasarkan ketentuan uji F dimana nilai probabilitas (p) \leq 0,05 dan nilai F hitung lebih besar dari F tabel dapat disimpulkan bahwa insentif eksekutif, *corporate risk*, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan konservatisme akuntansi secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

4.4.3 Uji Regresi Parsial (Uji T)

Tabel 4. 8 Uji T

Variabel	t hitung	Sig t	Keterangan
(Constant)		.047	
Insentif Eksekutif	-1.461	.158	Gagal Diterima
<i>Corporate risk</i>	.627	.537	Gagal Diterima
Kepemilikan Institusional	-1.142	.266	Gagal Diterima
Komisaris Independen	-.705	.488	Gagal Diterima
Komite Auditl	.441	.664	Gagal Diterima
Kualitas Audit	-3.815	.001	Diterima
Konservatisme akuntansi	-2.087	.049	Diterima

Sumber: Output yang diolah menggunakan IBM SPSS Statistics 24 (2018)

a. Hipotesis 1

Berdasarkan tabel uji t diatas menunjukkan bahwa nilai t-hitung -1.461 dan probabilitas 0.158 ($p \geq 0,05$) dapat disimpulkan bahwa H1 gagal diterima, artinya Insentif Eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

b. Hipotesis 2

Berdasarkan tabel uji t diatas menunjukkan bahwa nilai t-hitung 0.627 dan probabilitas 0.537 ($p \geq 0,05$) dapat disimpulkan bahwa H2 gagal diterima, artinya *Corporate risk* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

c. Hipotesis 3

Berdasarkan tabel uji t diatas menunjukkan bahwa nilai t-hitung -1.142 dan probabilitas 0.266 ($p \geq 0,05$) dapat disimpulkan bahwa H3 gagal diterima, artinya Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

d. Hipotesis 4

Berdasarkan tabel uji t diatas menunjukkan bahwa nilai t-hitung -0.705 dan probabilitas 0.488 ($p \geq 0,05$) dapat disimpulkan bahwa H4 gagal diterima, artinya Komisaris Independen idak berpengaruh terhadap *tax avoidance*

e. Hipotesis 5

Berdasarkan tabel uji t diatas menunjukkan bahwa nilai t-hitung 0.441 dan probabilitas 0.664 ($p \geq 0,05$) dapat disimpulkan bahwa H5 gagal diterima, artinya Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

f. Hipotesis 6

Berdasarkan tabel uji t diatas menunjukkan bahwa nilai t-hitung -3.815 dan probabilitas 0.01 ($p \leq 0,05$) dapat disimpulkan bahwa H6 diterima, artinya Kualitas Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

g. Hipotesis 7

Berdasarkan tabel uji t diatas menunjukkan bahwa nilai t-hitung -2.087 dan probabilitas 0.049 ($p \leq 0,05$) dapat disimpulkan bahwa H7 diterima, artinya Konservatisme Akuntansi berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh Insentif Eksekutif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan tabel uji t diatas menunjukkan bahwa nilai t-hitung -1.461 dan probabilitas 0.158 ($p \geq 0,05$) dapat disimpulkan bahwa H1 gagal diterima, artinya Insentif Eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini bisa disebabkan karena di Indonesia tidak memiliki standar khusus yang digunakan untuk penentuan pemberian insentif. Satu perusahaan dengan perusahaan lain memiliki perbedaan dalam pemberian insentif terhadap eksekutif sehingga bila insentif yang diberikan kecil maka tidak memiliki pengaruh terhadap motivasi kerja eksekutif, sehingga eksekutif tidak termotivasi dalam pengambilan kebijakan salah satunya kebijakan pajak. Sistem insentif atau kompensasi sebaiknya diubah dengan sistem insentif berbasis saham yang dinilai lebih efektif memotivasi kerja eksekutif dalam pembuatan kebijakan penghindaran pajak (Puspita dan Harto 2014). Hasil ini

sesuai penelitian (Dewi dan Sari 2015) bahwa insentif eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Namun hasil ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Farahmita 2012) menunjukkan bahwa insentif eksekutif berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

4.5.2 Pengaruh Corporate Risk terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan tabel uji t diatas menunjukkan bahwa nilai t-hitung 0.627 dan probabilitas 0.537 ($p \geq 0,05$) dapat disimpulkan bahwa H2 gagal diterima, artinya *Corporate risk* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian (Paglivora 2010) menjelaskan bahwa indikator penghitungan dapat menunjukkan karakter eksekutif dalam sebuah perusahaan apakah *risk taker* atau *risk averse*. Besar kemungkinan karakter eksekutif dalam penelitian ini adalah *risk averse* dimana karakter ini cenderung tidak berani mengambil risiko yang tinggi. Sehingga dalam pengelolaan perusahaan yang minim terhadap risiko tidak memiliki dampak terhadap penghindaran pajak, sehingga *corporate risk* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini didukung oleh penelitian (Butje 2014) yang menjelaskan bahwa *corporate risk* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dewi dan Jati 2014) yang menyebutkan bahwa Risiko perusahaan atau *corporate risk* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

4.5.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan tabel uji t diatas menunjukkan bahwa nilai t-hitung -1.142 dan probabilitas 0.266 ($p \geq 0,05$) dapat disimpulkan bahwa H3 gagal diterima, artinya Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan institusional belum mampu memberikan kontrol untuk menghindari manajemen melakukan penghindaran pajak. Hal ini bisa terjadi karena bisa jadi kepemilikan institusional mempercayakan pengawasan dan pengelolaan perusahaan pada dewan komisaris. Sehingga ada atau tidaknya kepemilikan institusional apabila wewenang diserahkan begitu saja kepada dewan komisaris tentu *tax avoidance* tetap terjadi (Dewi dan Sari 2015). Hasil penelitian lain (Sandy dan Lukviarman 2008) dan (Dewi dan Jati 2014) menyebutkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Namun hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Suardana 2014) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*..

4.5.4 Pengaruh Komisaris Independen terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan tabel uji t diatas menunjukkan bahwa nilai t-hitung -0.705 dan probabilitas 0.488 ($p \geq 0,05$) dapat disimpulkan bahwa H4 gagal diterima, artinya Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Dewi dan Jati 2014) menunjukkan bahwa

komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang kuat dalam penentuan kebijakan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan keterbatasan informasi yang dimiliki komisaris independen dari pada pihak manajemen atau internal perusahaan. Kurangnya pengetahuan latar belakang bisnis perusahaan tentu akan berdampak pada kinerja pengawasan komisaris independen yang mengakibatkan gagalnya perumusan strategi perusahaan yang efektif termasuk didalamnya strategi terkait perpajakan. Dalam penelitian (Dewi dan Sari 2015) juga menyebutkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Namun hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Suardana 2014) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

4.5.5 Pengaruh Komite Audit terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan tabel uji t diatas menunjukkan bahwa nilai t-hitung 0.441 dan probabilitas 0.664 ($p \geq 0,05$) dapat disimpulkan bahwa H_5 gagal diterima, artinya Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Komite audit memiliki peran atau tugas yang penting di dalam perusahaan. Peran komite audit adalah memeriksa dan mengawasi seluruh aktivitas pada saat proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal dalam perusahaan. Akan tetapi apabila komite audit berada pada periode yang lama dalam satu perusahaan tertentu akan memiliki dampak terhadap independensi komite audit itu

sendiri. Semakin lama komite audit bekerja dalam sebuah perusahaan tentu independensinya akan diragukan salah satunya independensinya terkait pelaporan pajak perusahaan. Hasil ini didukung penelitian (Dewi dan Sari 2015) menyebutkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Namun hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan (Dewi dan Jati 2014) di dalam penelitiannya menyebutkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

4.5.6 Pengaruh Kualitas Audit terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan tabel uji t diatas menunjukkan bahwa nilai t-hitung -3.815 dan probabilitas 0.01 ($p \leq 0,05$) dapat disimpulkan bahwa H_6 diterima, artinya Kualitas Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Audit merupakan komponen penting di dalam *corporate governance* yang erat kaitanya dengan salah satu prinsip *corporate governance* yaitu transparansi. Perusahaan publik semakin menuntut adanya transparansi pada laporan keuangan. Tingkat transparansi yang baik juga berdampak minat investor untuk menanamkan modal atau saham di dalam perusahaan (Winata 2014). Audit yang berkualitas tentunya berasal dari proses yang independen dan dilakukan oleh auditor yang memiliki *expert*. Di dunia audit, nama KAP *big four* sudah tidak asing lagi. KAP *big four* memiliki reputasi yang cukup baik. Jika dikaitkan dengan penghindaran pajak maka tentunya perusahaan yang

diaudit oleh KAP *big four* akan berusaha bersifat transparan dan akan sulit untuk melakukan manipulasi dalam laporan keuangan yang berkaitan dengan pajak. Hasil ini juga didukung oleh penelitian (Sandy dan Lukviarman 2008) dalam penelitiannya bahwa kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*

4.5.7 Pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan tabel uji t di atas menunjukkan bahwa nilai t-hitung -2.087 dan probabilitas 0.049 ($p \leq 0,05$) dapat disimpulkan bahwa H7 diterima, artinya Konservatisme Akuntansi berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Konservatisme akuntansi memiliki manfaat atau peranan di dalam teori keagenan yang paling efisien yang bisa membatasi konflik keagenan. Di dalam aktivitasnya seringkali perilaku *agent* meningkatkan kesejahteraannya sendiri. Konservatisme akuntansi dapat mencegah asimetri informasi dengan cara membatasi agen untuk melakukan praktik manipulasi di dalam laporan keuangan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Tresno 2012) dengan adanya Peraturan Perundang-undangan yang dibuat Pemerintah maka kecenderungan untuk melakukan praktik penghindaran pajak akan semakin sulit meskipun perusahaan memilih menggunakan metode akuntansi yang sifatnya konservatif. Sehingga Perusahaan yang menerapkan konservatisme akuntansi akan mendapatkan tingkat keagresifitasan pajak yang rendah. Di

dalam penelitian yang dilakukan oleh (Sarra et al. 2014) menyebutkan adanya pengaruh negatif signifikan konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance*.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan pengujian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka hasil penelitian ini membuktikan bahwa kualitas audit dan konservatisme akuntansi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Insentif eksekutif, *corporate risk*, Kepemilikan Institusional, komisararis independen dan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Hasil analisis dan kesimpulan penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang kemungkinan dapat mempengaruhi hasil penelitian yang ingin dicapai antara lain:

1. Penelitian ini hanya menggunakan Perusahaan sektor Pertambangan sebagai objek penelitian, sehingga tidak bisa membedakan spesifikasi jenis industri dimana secara struktur akuntansi antara industri yang satu dengan yang lainnya berbeda, sehingga dapat mempengaruhi hasil penelitian. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 5 perusahaan tambang.

2. Nilai koefisien determinasi sebesar 49.2% yang berarti artinya 49.2% *Tax avoidance* dipengaruhi oleh insentif eksekutif, *corporate risk*, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan konservatisme akuntansi, sisanya 51.8% dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

5.3 Saran

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka berikut adalah saran yang dapat bermanfaat pada penelitian selanjutnya:

1. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambah sampel penelitian dengan jenis perusahaan yang lain seperti perusahaan di bidang barang konsumsi dan perbankan. sehingga dapat memberi perbedaan terhadap variabel yang telah dilakukan dalam penelitian ini dengan jenis industri atau perusahaan yang berbeda.
2. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya agar menambah variabel independen lain seperti CSR, profitabilitas, atau koneksi politik.

5.4 Implikasi Penelitian

- a. Pihak Perusahaan: Diharapkan penelitian ini dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan kehati-hatian dalam melakukan *tax avoidance* agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.
- b. Pihak Investor: Bagi para investor yang memiliki kepentingan dengan suatu perusahaan, tentu harus lebih meningkatkan pengawasan kepada

pihak manajemen, agar memperhatikan tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh perusahaan tersebut sehingga kemungkinan perusahaan melakukan tindakan penyimpangan penghindaran pajak menjadi semakin kecil, sehingga investor pun akan merasa aman dan terhindar dari kasus-kasus yang tidak diinginkan.

- c. Pihak Pemerintah: Bagi pihak pemerintah diharapkan agar lebih tegas dalam membuat dan menyusun peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan khususnya yang berkaitan dengan wajib pajak badan, agar peraturan yang telah diberlakukan tidak memiliki celah yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan oleh pelaku pajak yang dalam kaitanya adalah penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Armstrong, Christopher S., Jennifer L. Blouin, Alan D. Jagolinzer, and David F. Larcker. 2015. "Corporate Governance, Incentives, and *Tax avoidance*." *Journal of Accounting and Economics* 60 (1): 1–17. doi:10.1016/j.jacceco.2015.02.003.
- Butje, Stella. 2014. "Pengaruh Karakter Eksekutif dan Koneksi Politik Terhadap *Tax avoidance*" 4 (2): 1–9.
- Darmawan, I Gede Hendy, and I Made Sukartha. 2014. "Pengaruh Penerapan Corporate Governance , Leverage , Return On Assets , dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak I Gede Hendy Darmawan" 1: 143–61.
- Dewi, Gusti Ayu Pradnyanita, and Maria M Ratna Sari. 2015. "Pengaruh Insentif Eksekutif , Corporate Risk Dan Corporate Governance Pada *Tax avoidance*." *Jurnal Akuntansi*, no. Universitas Udayana: 50–67.
- Dewi, Ni Nyoman, and I ketut Jati. 2014. "Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada *Tax avoidance* Di Bursa Efek Indonesia." *Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Tax avoidance Di Bursa Efek Indonesia* 6 (T): 249–60.
- Gebhart, Markus Sebastian. 2017. "Measuring Corporate *Tax avoidance* – An Analysis of Different Measures" 2 (2): 43–60.
- Farahmita. 2012 Insentif Manajemen Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.
- Hotman T Pohan. 2009. "Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, Akrua Pilihan, Tarif Efektif Pajak, Dan Biaya Pajak Ditunda Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik" 4 (2).
- Pramudito, Batara Wiryo, and Maria M Ratna Sari. 2015. "Manajerial dan Ukuran Dewan Komisaris. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia" 13: 737–52.
- Puspita, Silvia Ratih, and Puji Harto. 2014. "Penghindaran Pajak" 3: 1–13.
- Sandy, Syeldila, and Niki Lukviarman. 2008. "Pengaruh Corporate Governance Terhadap *Tax avoidance* : Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur." *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* 19: 85–98. doi:10.1017/CBO9781107415324.004.
- Sarra, Hustna Dara, Dosen Fakultas, Bisnis Universitas, Muhammadiyah Tangerang, Kata Kunci, Penghindaran Pajak, and Effective Tax Rate. 2014. Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Industri Kimia Dan Logam Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014)."

- Suardana, Ketut Alit. 2014. "Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif pada *Tax avoidance*" , Indonesia Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali ,” 2: 525–39.
- Swingly, Calvin, and I Made Sukartha. 2015. "Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Sales Growth Pada *Tax avoidance*." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 1: 47–62.
- Winata, Fenny. 2014. "Pengaruh Corporate Governance Terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI tahun 21013” 4 (1).
- Khurana, I.K., dan W.J. Moser. 2009. Insti- tutional Ownership and Tax Aggres- siveness. Diakses dari www.ssrn.com.
- Budiman, Judi dan Setiyono. 2012. Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (TaxAvoidance). Electronic Theses & Dissertations (ETD) Univeritas Gajah Mada.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Methods*). Alfabeta. Bandung.
- Jensen, Michael C., Meckling, William H. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, Vol 3, No 4.
- Paligorova, Teodora. 2010. Corporate Risk Taking and Ownership Structure, Bank of Canada Working Paper, 2010-3.
- Metrotvnews.com (2017). Kontrak Karya Tambang Jadi Celah untuk Menghindari Pajak <http://ekonomi.metrotvnews.com/energi/wkBAQnvb-kontrak-karya-tambang-jadi-celah-untuk-menghindari-pajak>. Di akses pada tanggal 10 Maret 2018
- Pajak.go.id (2013). Penghindaran Pajak perusahaan global di dunia <http://www.pajak.go.id/content/penghindaran-pajak-perusahaan-global-didunia>. Di akses pada tanggal 10 Maret 2018
- Lukviarman, Niki. 2016. *Corporate Governance*. PT Era Adicitra Intermedia. Solo.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS19* (5th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Sampel Perusahaan

No	Kode Saham	Nama Perusahaan
1	CTTH	Citatah Tbk
2	ELSA	Elnusa Tbk
3	PTBA	Tambang Batubara Bukit Asam Tbk
4	RUIS	Radiant Utama Interinsco Tbk
5	TINS	Timah (Persero) Tbk

Lampiran 2: Input data Variabel Dependen

No	Kode Perusahaan	Tahun	Laba Sebelum Pajak	Beban Pajak / 25%	Book Tax Different
1	CTTH	2012	3,198,037,734	9,196,709,600	-5,998,671,866
		2013	1,925,897,934	8,654,900,800	-6,729,002,866
		2014	644,290,370	1,128,192,000	-483,901,630
		2015	3,987,537,336	9,351,533,900	-5,363,996,564
		2016	26,764,367,473	27,218,642,400	-454,274,927
		2017	6,947,634,696	8,038,556,000	-1,090,921,304
2	ELSA	2012	211,071,000,000	301,896,000,000	-90,825,000,000
		2013	337,200,000,000	378,380,000,000	-41,180,000,000
		2014	565,263,000,000	535,224,000,000	30,039,000,000
		2015	507,738,000,000	511,972,000,000	-4,234,000,000
		2016	418,318,000,000	409,008,000,000	9,310,000,000
		2017	326,366,000,000	302,448,000,000	23,918,000,000
3	PTBA	2012	3,911,587,000,000	3,738,764,000,000	172,823,000,000
		2013	2,461,362,000,000	2,236,428,000,000	224,934,000,000
		2014	2,413,952,000,000	2,200,684,000,000	213,268,000,000
		2015	2,663,796,000,000	2,506,632,000,000	157,164,000,000
		2016	2,696,916,000,000	2,607,388,000,000	89,528,000,000
		2017	6,101,629,000,000	6,393,344,000,000	-291,715,000,000
4	RUIS	2012	48,226,597,997	76,931,554,072	-28,704,956,075
		2013	56,362,930,594	26,909,771,472	29,453,159,122
		2014	78,373,285,029	86,499,702,816	-8,126,417,787
		2015	70,030,859,016	109,517,760,052	-39,486,901,036
		2016	54,852,288,151	111,697,569,280	-56,845,281,129
		2017	38,913,911,728	67,702,225,724	-28,788,313,996
5	TINS	2012	607,858,000,000	818,960,000,000	-211,102,000,000
		2013	801,502,000,000	1,028,404,000,000	-226,902,000,000
		2014	1,024,844,000,000	1,407,412,000,000	-382,568,000,000
		2015	168,163,000,000	266,408,000,000	-98,245,000,000
		2016	414,970,000,000	527,684,000,000	-112,714,000,000
		2017	716,211,000,000	829,188,000,000	-112,977,000,000

Lampiran 3: Input data Variabel Independen

N0	Kode Perusahaan	Tahun	IE	Risk	KI	Komisaris Independen	Komite Audit	Kualitas Audit	ConACC
1	CTTH	2012	0.03927	0.000187	0.522167	0.333333	3	0	-0.02792
		2013	0.026806	0.00443	0.522167	0.333333	3	0	-0.01648
		2014	0.027178	0.015551	0.522167	0.333333	3	0	0.060935
		2015	0.036522	0.00539	0.522167	0.333333	3	0	0.026604
		2016	0.027178	0.019959	0.51905	0.333333	2	0	0.047583
		2017	0.034525	0.006068	0.572445	0.5	3	0	-0.10633
2	ELSA	2012	0.00289	0.031203	0.683315	0.4	4	1	-0.09354
		2013	0.004935	0.002653	0.683315	0.4	4	1	-0.1169
		2014	0.007964	0.05512	0.683315	0.4	4	1	-0.00059
		2015	0.007199	0.038848	0.683315	0.4	4	1	-0.01012
		2016	0.00654	0.019251	0.560034	0.4	3	1	-0.03128
		2017	0.005792	0.0028	0.560034	0.4	2	1	-0.0298
3	PTBA	2012	0.000229	0.249568	0.650174	0.333333	4	1	0.054616
		2013	0.000253	0.143925	0.650174	0.333333	4	1	-0.01687
		2014	0.003799	0.124827	0.650174	0.333333	2	1	0.00291
		2015	0.003318	0.108629	0.650174	0.333333	4	1	0.008248
		2016	0.003267	0.09815	0.650174	0.333333	3	1	0.005171
		2017	0.000322	0.182087	0.650174	0.333333	3	1	0.096909
4	RUIS	2012	0.005817	0.027301	0.399222	0.333333	3	0	-0.03954
		2013	0.005269	0.029811	0.399222	0.333333	3	0	-0.05187
		2014	0.007828	0.04088	0.399222	0.333333	3	0	-0.00557
		2015	0.006793	0.01044	0.399221	0.333333	3	0	-0.18719
		2016	0.011114	0.000926	0.399221	0.333333	3	0	-0.13632
		2017	0.014357	0.027631	0.399221	0.333333	3	0	-0.01094
5	TINS	2012	0.004375	0.026056	0.650002	0.333333	4	1	-0.09372
		2013	0.005516	0.044389	0.650002	0.333333	4	1	-0.03126
		2014	0.004056	0.044853	0.650002	0.5	4	1	0.135161
		2015	0.004054	0.020907	0.650002	0.5	4	1	-0.12809
		2016	0.002574	0.006269	0.650002	0.5	4	1	-0.08455
		2017	0.003076	0.025271	0.650002	0.333333	4	1	0.029503

Lampiran 4 : Hasil Output SPSS

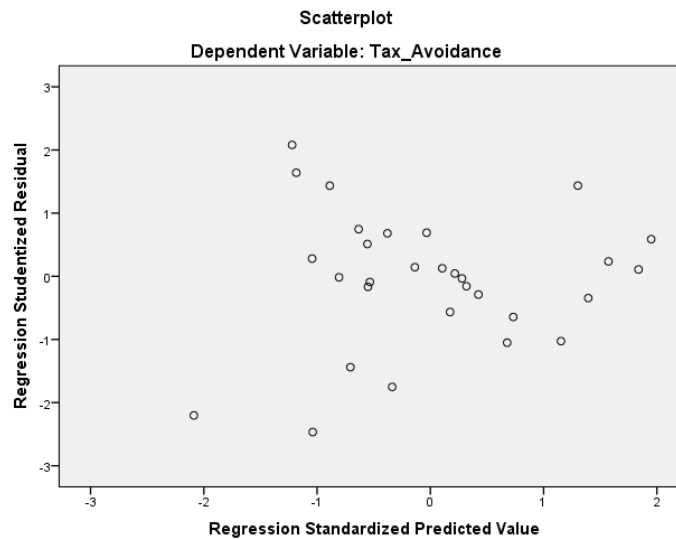
Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

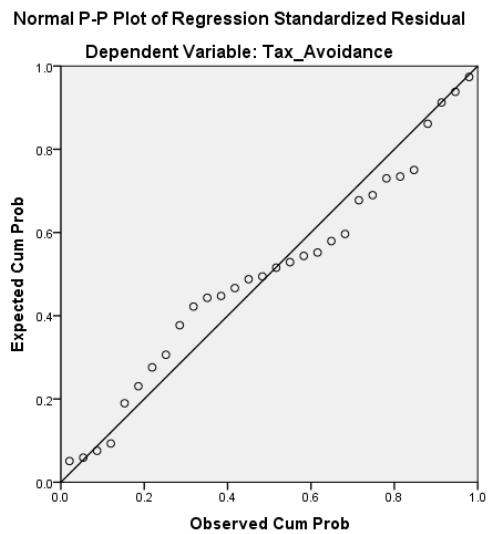
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.434E+11	1.634E+11		2.101	.047		
	Insentif_Eksekutif	-3.960E+12	2.711E+12	-.342	-1.461	.158	.320	3.121
	Corporate_Risk	3.218E+11	5.128E+11	.143	.627	.537	.335	2.986
	Kepemilikan_Institusional	-3.133E+11	2.742E+11	-.244	-1.142	.266	.384	2.605
	Komisaris_Independen	-2.648E+11	3.755E+11	-.116	-.705	.488	.645	1.550
	Komite_Audit	1.754E+10	3.981E+10	.087	.441	.664	.453	2.209
	Kualitas_Audit	-2.349E+11	6.157E+10	-.875	-3.815	.001	.333	3.003
	Konservatisme_Akuntans	-6.413E+11	3.073E+11	-.342	-2.087	.049	.651	1.537

a. Dependent Variable: Tax_Avoidance

Uji Heteroskedasitas



Uji Normalitas



Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.784 ^a	.615	.492	9.533E+10	1.165

a. Predictors: (Constant), Konservatisme_Akuntansi, Insentif_Eksekutif, Komisaris_Independen, Komite_Audit, Kualitas_Audit, Kepemilikan_Institusional, Corporate_Risk

b. Dependent Variable: Tax_Avoidance

Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.188E+23	7	4.555E+22	5.012	.002 ^b
	Residual	1.999E+23	22	9.088E+21		
	Total	5.187E+23	29			

a. Dependent Variable: Tax_Avoidance

b. Predictors: (Constant), Konservatisme_Akuntansi, Insentif_Eksekutif, Komisaris_Independen, Komite_Audit, Kualitas_Audit, Kepemilikan_Institusional, Corporate_Risk

Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.434E+11	1.634E+11		2.101	.047		
	Insentif_Eksekutif	-3.960E+12	2.711E+12	-.342	-1.461	.158	.320	3.121
	Corporate_Risk	3.218E+11	5.128E+11	.143	.627	.537	.335	2.986
	Kepemilikan_Institusional	-3.133E+11	2.742E+11	-.244	-1.142	.266	.384	2.605
	Komisaris_Independen	-2.648E+11	3.755E+11	-.116	-.705	.488	.645	1.550
	Komite_Audit	1.754E+10	3.981E+10	.087	.441	.664	.453	2.209
	Kualitas_Audit	-2.349E+11	6.157E+10	-.875	-3.815	.001	.333	3.003
	Konservatisme_Akuntansi	-6.413E+11	3.073E+11	-.342	-2.087	.049	.651	1.537

a. Dependent Variable: Tax_Avoidance

Uji Multiple Regression

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.434E+11	1.634E+11		2.101	.047
	Insentif_Eksektif	-3.960E+12	2.711E+12	-.342	-1.461	.158
	Corporate_Risk	3.218E+11	5.128E+11	.143	.627	.537
	Kepemilikan_Institusional	-3.133E+11	2.742E+11	-.244	-1.142	.266
	Komisaris_Independen	-2.648E+11	3.755E+11	-.116	-.705	.488
	Komite_Audit	1.754E+10	3.981E+10	.087	.441	.664
	Kualitas_Audit	-2.349E+11	6.157E+10	-.875	-3.815	.001
	Konservatisme_Akuntansi	-6.413E+11	3.073E+11	-.342	-2.087	.049

a. Dependent Variable: Tax_Avoidance

